BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Bandung

Dinas perhubungan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah dan lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Sebelum berubah menjadi Dinas Perhubungan, nomenklaturnya adalah sebagai berikut:

1. Dinas lalulintas dan angkatan jalan provinsi daerah tingkat I Jawa Barat cabang kotamadya daerah tingkat II bandung, sampai dengan 1997.
2. Dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 dirubah menjadi Dinas lalu Lintas daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 1997 tanggal 1 April 1997 tentang Pembentukan Dinas lalu Lintas dan Angkatan Jalan Kota Madya daerah tingkat II Bandung.
3. Dan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang menjadi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Dinas Perhubungan selaku perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan program *car free day*, mendapatkan mandate dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota

Banduyng selaku pemangku kebijakan-kebijkan internal dalam Kota termasuk seluruh kebutuhan lalulintas dan penyelenggaraannya di Bandung.

Program *car free day* kota Badnung dimulai diberlakukan oleh Dinas Perhubungan Kota bandung pada bulan Mei 2010. Kegiatan ini merupakan program yang digalakan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberikan ruang hijau terbuka tanpa asap kendaraan bermotor. Program *car free day* masih dilakukan sampai dengan sekarang dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan program oleh Dinas Perhubungan. Kegiatan *car free day* pun sekarang tidak hanya difokuskan pada seputaran jalan Ir. H. Djuanda (dago) saja, tetapi kawasan Buahbatu pun akan dijadikan sebagai kawasan bebas kendaraan bermotor selanjutnya.

3.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari berdirinya Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

1. Perda No. 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas daerah Kota Bandung.
2. Perda No. 2 tahun 2008 tentang penyelenggaraan perhubungan.
3. Perda No. 13 tahun 2007 tentang pe.nyelenggaraan perparkiran.
4. Peraturan Walikota Bandung No. 475 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi pada Dinas daerah Kota Bandun

3.3 Tugas Pokok dan Fugsi Dinas Perhubungan Kota Bandung

3.3.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung di bidang perhubungan Berdasarkan atas otonomi dan pembantuan**.**

3.3.2 Fungsi

Fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Bandung terdisi atas empat dasar utama yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional perhubungan yang meliputi lalu lintas parkir, angkutan, terminal, saranan dan operasional.
4. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative dinas.

3.4 Visi dan Misi

3.4.1 Visi

Visi dari Dinas perhubungan Kota Bandung, yaitu mewujidkan system transportasi kota yang lebih baik untuk mendukung Kota Bandung sebagai kota jasa yang BERMARTABAT.

3.4.2 Misi

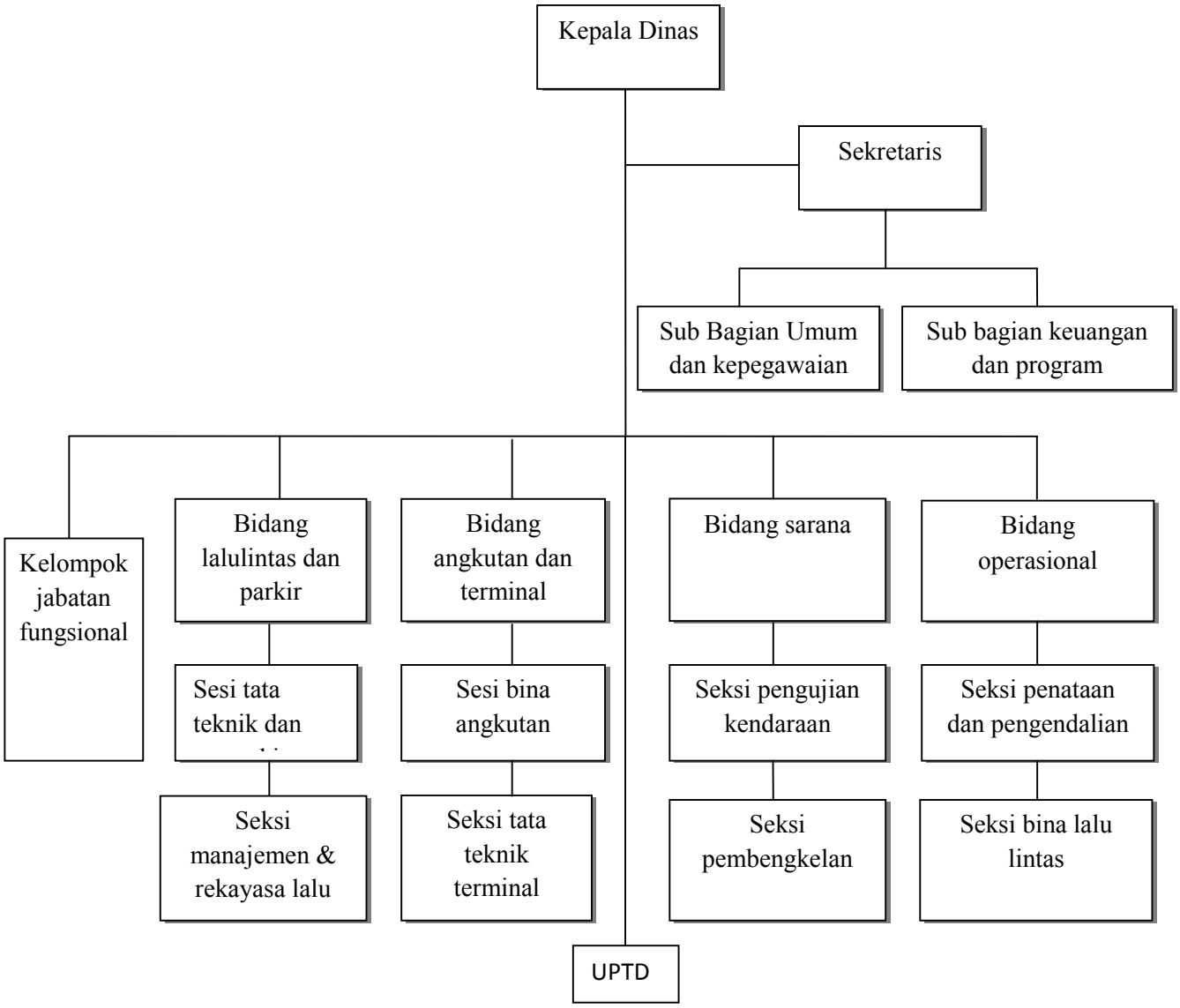
Misi dari Dinas Perhubungan Kota Bandung tertuang dalam lima pandangan sebagai berikut:

1. Mengendalikan aspek-aspek penyebab kemacetan
2. Pengembangan SAUM (Saranan angkutan umum missal) dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor.
3. Meningkatkan kelayakan pengoperasian angkutan umum dan barang
4. Meningkatkan prasana transportasi yang memadai, seperti terminal, dan fasiltas pelengkap jalan.
5. Meningkatkan profesionalisme aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung.

3.5 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007, maka struktur organisasi Dinas Perhubungan KJota Bandung sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung



Sumber: Data Dishub Kota Bandung, 2011.

3.6 Data Kepegawaian

3.6.1 Tingkat Pendidikan Pegawai

Data Dinas perhubungan Kota Bandung pada tahun 2011, mecatat jumlah kepegawaian instansi berjumlah 514 orang yang terdiri dari, 491 orang pegawai laki-laki, dan 23 orang pegawai perempuan.

Jumlah pegawai di lihat dari tingkat pendidikannya dapat dilihat dari uraian tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tingkat pendidikan pegawai

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	S-3	1 orang
2.	S-2	10 orang
3.	S-1	50 orang
4.	D-IV	2 orang
5.	D-III	10 orang
6.	SLTA / Sederajat	357 orang
7.	SMP / Sederajat	40 orang
Jumlah		514 orang

Sumber: Data Dishub Kota Bandung, 2011.

3.6.2 Pangkat/ Golongan Pegawai

Pangkat/ golongan pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Pangkat/ golongan pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	1 orang
4.	IV/b	1 orang
5.	IV/a	5 orang
6.	III/d	7 orang
7.	III/c	7 orang
8.	III/b	52 orang
9.	II/d	19 orang
10.	II/c	16 orang
11.	II/b	-
12..	II/a	289 orang
13.	I	61 orang

Sumber: Data Dishub Kota Bandung, 2011

3.6.3 Status Pegawai

Status kerja pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Status pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung

No.	Komposisi Pegawai	Jumlah
1.	Honorer/TKK (digaji dalam APBD)	165 orang
2.	Tenaga Sukarela / magang	-

Sumber: Data Dishub Kota Bandung, 2011

3.6.4 Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Status pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat yang Dibutuhkan	Jumlah Pejabat yang Ada
1.	Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan	-	27 orang
2.	Jabatan Fungsional PPNS	-	21 orang

Sumber: Data Dishub Kota Bandung, 2011

3.7 Kegiatan Pembangunan

Kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal.
4. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan.
5. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan.
6. Pembangunan halte bis dan taksi.
7. Pengoperasian angkutan masal/ bus line
8. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas.
9. Pengadaan marka jalan.
10. Pengadaan papan petunjuk parkir.
11. Rehabilitasi/ pemeliharaan ATCS.
12. Rehabilitasi/ pemeliharaan ATCS (bantuan provinsi).
13. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.
14. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor.
15. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor.
16. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.
17. Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.

3.8 Penghargaan yang Diperoleh Dinas Perhubungan Kota Bandung

1. Plakat lomba tata tertib lalu lintas dan angkutan kota tingkat nasional tahun 2004.
2. Piala Wahana Tata Nugraha lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota tingkat nasional tahun 2005.
3. Juara 1 lomba tata tertib lalu lintas tingkat provinsi Jawa Barat dalam rangka hari perhubungan nasional tahun 2007.
4. Juara 2 Wahana Tata Nugraha tingkat nasional tahun 2007.